DRAFT

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

DRAFT

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020;

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003;

Magnis Suseno Franz, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001;

Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008;

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005;

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),* Kencana, 2009;

Atala, dkk, *Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 Juni 2024;

Gede Sujana I, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945*, Indonesian Journal of Law Research, Vol 2 No 1, Maret 2024;

Hadi Fikri, Farina Gandryani, *Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif (Strengthening The Regeneration Of Political Parties Through The Enactment Of Political Party Membership Requirement In Legislative Election),* Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024;

Hasanah Nurul, dkk, *Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Penetapan Kenaikan Gaji Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan*

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PRO PATRIA

DRAFT

Indonesia State Administrative Law Analysis Of The Mechanism For Determining The Increase In The Salary Of Dpr Members In The Indonesian State Constitutional System, Sibatik Journal Volume 5 No.1, 2025;

Hasmiyati, dkk, *Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR,* Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman Volume 3 Nomor 1 Maret 2025;

Julyano Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,* Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019;

Justitia Airlangga, dkk, *Interim Dismissal of DPRD Members Who Commit Criminal Offenses,* Journal of Ecohumanism, Volume: 3, No: 3, 2024;

Manan Bagir, *Penegakan Hukum yang berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan, 2005.

Muchlisin, *Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia,* MIMBAR YUSTITIA Vol. 3 No.2 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X, 2019;

Morya Yopie, Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012;

Nurmawati Made, dkk, *Hukum Kelembagaan Negara,* 2017;

Prasetyo Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, 2013;

DRAFT

Putri Cahyawati Dwi, Bintan Saragih, *Reconstruction of Political Party Membership In the Indonesian House of Representatives,* Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal), Vol. 8 No. 2, 2020;

Putra Indratanto, Samudra Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden*, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Imu Hukum 16, no. 1, 2020;

Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010;

Rowa Hyronimus, *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri 2015;

Subardi Adi, dkk, *Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota Dprd (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat) Legal Study Of Bribery Crimes Resembling Monetary Donations In The Context Of General Elections For Dprd Members (Case Study In Bawaslu West Lombok Regency),* Unizar Recht Journal Volume 3 No. 1, April 2024;

Kurniawan Hendri, *Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Periode 2019-2021*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022;

Taufan Tri Utama Muh, *Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terhadap Anggota DPR-RI Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021;

DRAFT

Mukaromah Nurul, *Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dpr Ri Dalam Menegakkan Kode Etik Atas Pelanggaran Etika Anggota DPR RI Tahun 2005-2010*, Tesis, 2011;

Penonaktifan Dan Pemberhentian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR - LP2KI FH-UH, diakses pada Tanggal 8 Desember 2025;

Penonaktifan Tanpa Sanksi, Parpol Dinilai Hanya 'Sembunyikan' Anggota DPR Bermasalah, diakses pada Tanggal 8 Desember 2025;

Siapa yang Tentukan Gaji DPR? Ini Ketentuannya Menurut Undang-undang, diakses pada Tanggal 7 Januari 2026.

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PRO PATRIA